

Nugroho Nur Susanto

Balai Arkeologi Kalimantan Selatan,
Jalan Gotong Royong II, Rt. 03/06,
Banjarbaru 70711, Kalimantan Selatan;
email:nugroho.nur@kemdikbud.go.id

Diterima 17 November 2018

Direvisi 3 Desember 2018

Disetujui 17 Desember 2018

EKSPLOITASI HUTAN DAN TAMBANG PADA MASA KOLONIAL DI KALIMANTAN BAGIAN UTARA

FOREST AND MINING EXPLOITATION DURING THE COLONIAL PERIOD IN THE NORTHERN PART OF KALIMANTAN

Abstrak. Informasi tentang potensi dan jenis kekayaan alam di negeri kita terbatas, meskipun kegiatan eksplorasi dan eksploitasi telah berlangsung lama sejak era kolonialisme. Di Kalimantan khususnya tidak semua informasi ini bersifat terbuka, apalagi menyangkut dua pihak yang berbeda posisi dan kepentingan. Satu pihak, Belanda sebagai penguasa teritorial di wilayah jajahan, yang terkesan tertutup. Di lain pihak, masyarakat Indonesia yang telah merdeka adalah pemilik asli alam beserta yang terkandung di dalamnya. Permasalahan yang diangkat adalah mulai kapan dan siapa yang berperan dalam kegiatan eksploitasi kekayaan alam Kalimantan bagian utara. Penelitian ini memiliki kontribusi untuk menggambarkan kegiatan eksploitasi alam dan jenis komoditas yang diambil. Melalui metode survei arkeologi di lapangan dan studi pustaka, maka dapat diketahui apa dan kapan eksploitasi alam di Kalimantan bagian utara ini dilakukan. Jejak peninggalan arkeologi menunjukkan bahwa bukan hanya imperialisme Barat, tetapi Jepang pun telah lama berupaya dalam mengeksploitasi kekayaan alam di bagian utara Kalimantan ini. Kekayaan alam yang telah dikeruk, baik eksploitasi kayu hasil hutan maupun mineral tambang yang terkandung di dalamnya. Data peninggalan arkeologi telah merekam jejak eksploitasi. Upaya eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam memerlukan azas perikehidupan dalam keseimbangan, sehingga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dapat berkesinambungan dan maksimal.

Kata kunci: Kalimantan Utara, Tideng Pale, eksploitasi kayu, eksploitasi bahan tambang, Investasi Jepang

Abstract. Information about the potential and types of natural wealth in our country is limited, even though exploration and exploitation activities have been going on for a long time since the era of colonialism. Particularly in Kalimantan, not all of this information is open, especially regarding two parties with different position and interest. One party, the Netherlands as a territorial ruler in the colony, seemed to be closed. On the other hand, the Indonesian people, who have been independent, are the original owners of nature with its contain. Through the archaeological survey method in the field and confirmed by literature study, it can be known who and when the exploitation of nature in northern Kalimantan had been taken place. Through archaeological footprints, it shows that not only Western imperialism, but also Japan had long been trying to exploit natural resources in this northern part of Borneo. Natural resources that have been dredged were both, in the form of exploitation of forest products, as well as minerals exploitation. Archaeological data have recorded the traces of exploration and exploitation activities. Exploitation and utilization of natural resources requires the principle of balance life, so that the benefits can be continuous and maximized.

Keywords: North Kalimantan, Tideng Pale, wood exploitation, mining material exploitation, Japanese investment

PENDAHULUAN

Pulau Kalimantan, khususnya daerah teritorial jajahan Belanda di bagian utara, merupakan daerah yang kaya sumber daya alam. Potensi alamnya tersebar luas di berbagai pelosok, baik yang tumbuh di permukaan bumi berupa hasil hutan, maupun yang tersimpan di dalam perut bumi berupa bahan tambang. Kekayaan alam berupa

kayu sebagai hasil hutan, tidak lepas dari kondisi tanah yang subur di sepanjang endapan alluvial yang dibawa oleh aliran sungai. Kekayaan yang terpendam di perut bumi masih memerlukan penyelidikan dan eksplorasi, sebagaimana kekayaan di Kalimantan bagian timur dan tenggara yang lebih dahulu dikenal, seperti batu bara dan minyak bumi. Sekitar pertengahan abad ke-20 Masehi upaya penemuan dan eksploitasi

komoditas tersebut menyedot perhatian, sehingga aspek politik dominan dan dari sisi ekonomi sangat menguntungkan. Situasi pasang surut penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam terus berlangsung mengingat keterbatasan sumber daya manusia dan modal usaha.

Penemuan potensi awal batu bara di tepi Mahakam di wilayah Kalimantan bagian timur telah dilaporkan oleh sumber kolonial *Verslag* sejak tahun 1827, sedangkan agen pedagang GP. King dari Inggris dan J. Morgan perusahaan swasta dari Inggris mengadakan eksplorasi di tahun 1845 (Ahyat 2012: 111). Rupanya Belanda merasa tertantang untuk eksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam di Pulau Kalimantan. Hal ini terbukti dengan upaya awal kegiatan eksploitasi batu bara *De Hoop* di Lok Pinang dekat Batu Api di daerah Riam Kiwa, Kalimantan Selatan sekitar tahun 1846-1884 (Posewitz 1892: 271; Oktrivia dan Susanto 2016: 130). Belanda merasa sukses dan bangga dengan beroperasinya perusahaan eksploitasi batu bara *Oranje Nassau* di Pengaron, yang memiliki kualitas yang dapat bersaing dengan batu bara produk Inggris. C.De Groot melaporkan hasil penelitiannya tentang kualitas batu bara dari Kalimantan, khususnya dari Pengaron (Groot 1868: 146-148). Penemuan batu bara di Kalimantan memacu penemuan di Sumatra, tepatnya Sawah Lunto, Ombilin oleh Groot pada tahun 1876, dan mulai dieksploitasi pada tahun 1900-an dengan modal yang sangat besar dan menghasilkan batu bara yang melimpah (Erman 2005: 30-32).

Penemuan minyak di Telaga Tunggul 1 pada tahun 1884 oleh Aeliko J. Zijlker merupakan tonggak awal ditemukannya cadangan minyak bumi pertama di Nusantara (Utomo 2012: 27). Telaga Tunggul 1 yang berada di Desa Telaga Said adalah wilayah Kesultanan Langkat di Sumatra Utara. Penemuan cadangan minyak bumi di Langkat, Sumatra Utara ini tidak berselang lama dari penemuan cadangan minyak bumi pertama di dunia secara modern di Titusville, Pennsylvania, Amerika Serikat. Peristiwa penting itu berlangsung, pada tahun 1859 yang dilakukan oleh Edwin L. Drake dan William Smith (Zain dkk. 2015: 6-7). Penemuan awal batu bara di

Kalimantan telah memacu berbagai penelitian dan usaha eksplorasi di Sumatra, demikian juga sebaliknya penemuan minyak bumi di Pulau Sumatra memicu usaha yang sama atas kandungan minyak bumi di Pulau Kalimantan. Usaha tersebut membuahkan hasil berkat kegigihan dan peran H.J Menten.

Apabila penemuan batu bara terkait dengan revolusi industri 1, diindikasikan dengan penemuan mesin uap, maka perburuan minyak bumi sangat berhubungan dengan penemuan alat transportasi modern yang menggunakan minyak bumi sebagai tenaga penggerak. Dengan demikian era penemuan minyak bumi dapat dikaitkan dengan revolusi industri ke-2. Penemuan kekayaan alam lain pun diperlukan dalam upaya membawa dunia semakin modern dan kebutuhan komponen pembuatan mesin semakin meningkat. Perkembangan industri, teknologi, ekonomi, dan politik dunia global berimbas langsung ke wilayah-wilayah yang terkena dampak imperialisme dan kolonialisme. Letak wilayah imperialisme Belanda dan Inggris di Pulau Kalimantan menjadi panggung tersendiri sebagai arena persaingan terselubung. Belanda berhasil menancapkan kekuasaan di Kesultanan Bulungan, Berau, dan Kutai, sedangkan Inggris dekat dan berpengaruh di Serawak berhasil menaklukkan Kesultanan Brunei. Sistem ekonomi modern yang menghadirkan para pemodal atau investor, membuat aturan dan persaingan semakin seru di daerah ini. Hal-hal inilah yang membuat daerah utara Kalimantan patut mendapat perhatian lebih, untuk memahami sejarah dan perkembangannya, terutama dari aspek ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam.

Kesultanan Bulungan pernah diidentikkan dengan Kabupaten Bulungan, namun demikian secara administratif pemekaran dan pemisahan diri terjadi di waktu belakangan ini. Kabupaten Bulungan, Nunukan, dan Tana Tidung merupakan wilayah administrasi baru, yang dahulu tidak terpisahkan sebagai wilayah hegemoni Kesultanan Bulungan dan Tidung. Namun untuk mempersempit permasalahan, wilayah yang akan dibahas pada wilayah perbatasan atau Kalimantan bagian utara di wilayah Indonesia.

Pada saat ini ada suatu daerah atau kampung bernama Tideng Pale. Lokasi Kampung Tideng Pale terletak tidak jauh dari tepi Sungai Sesayap, yang dahulu terpisah dari Kesultanan Bulungan yang beribu kota di Tanjung Palas. Kerajaan Tidung dipercayai berbentuk kerajaan kecil, yang merupakan aktualisasi hegemoni yang berasal dari suatu komunitas masyarakat yang berlatar belakang suku Tidung (Susanto 2013b: 125-128). Secara tradisi komunitas ini berbentuk suatu institusi yang berdiri sendiri yang kemudian dikuasai oleh Kesultanan Bulungan yang mendapat pengakuan dari kolonialisme Belanda. Pada waktu yang lalu wilayah *underdistrick* ini menjadi Kabupaten Bulungan, dan semenjak tahun 2012 wilayah tiga kecamatan di wilayah Kabupaten Bulungan membentuk kabupaten baru bernama Kabupaten Tana Tidung.

Publikasi dan laporan yang berhubungan dengan potensi peninggalan arkeologi di daerah ini, tidak banyak diberitakan. Apalagi terkait dengan peninggalan arkeologi dan sejarah, khususnya saat imperialisme atau masa kolonial. Laporan masyarakat pada tahun 2012 menginformasikan adanya temuan struktur bangunan lama yang mengindikasikan kegiatan eksploitasi alam di sekitar calon ibu kota Kabupaten Tana Tidung. Permasalahan pun muncul, siapa dan kapan eksploitasi alam di daerah ini mulai dikerjakan? Pertanyaan ini perlu dijawab dalam upaya pengungkapan kronologi dan aktor yang terlibat serta jenis potensi kekayaan alamnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan penalaran induktif. Metode deskriptif, dimaksudkan sebagai serangkaian kerja dengan cara menggambarkan data temuan, kondisi, dan situasi peninggalan arkeologinya. Penalaran induktif dapat diartikan sebagai penjelasan makna dari fakta-fakta yang diperoleh. Adapun metode pengumpulan data penelitian meliputi metode survei observasi di lapangan, wawancara dengan orang yang berkompeten yang

berhubungan dengan keberadaan situs, dan mempelajari laporan-laporan serta sumber pustaka lainnya. Dalam hal ini upaya melengkapi informasi dan untuk menuju analisis diperlukan sumber-sumber pustaka yang relevan. Penjelasan dan alur informasi yang dihasilkan diharapkan dapat membantu dalam upaya memahami sejarah lokal, khususnya Desa Tideng Pale yang direncanakan sebagai pusat kota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah administrasi Kecamatan Sesayap yang sekarang, secara geografis memiliki wilayah pegunungan dan dataran rawa yang merupakan lembah pasang surut karena aliran Sungai Sesayap. Dari segi administrasi wilayah Kecamatan Sesayap ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Malinau. Observasi di wilayah Sesayap diperoleh data arkeologi sebagai berikut.

Situs Penggergajian Kayu/*Sawmill*

Secara administrasi situs tempat penggergajian yang umum disebut *sawmill* terletak di Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap (induk). Situs ini lebih dikenal sebagai *sawmill*, aktivitas industri perikanan, yang secara rinci berhubungan dengan aktivitas penebangan, pemotongan, dan pembelahan kayu serta pembuatan perahu. Fungsi terakhir ini ditandai dengan lokasinya yang berada di sungai kecil, yang terhubung dengan Sungai Sesayap yang berfungsi sebagai galangan kapal.

Secara umum lokasi situs tidak ini jauh dari ujung timur Jl. Sudirman, Tideng Pale yang merupakan dataran rendah yang berkembang sebagai kawasan ekonomi. Ada beberapa unsur bangunan atau tempat aktivitas yang terkait dengan peninggalan *sawmill*, dan akan diuraikan berikut ini.

Tempat Pembakaran Residu

Bangunan tempat pembakaran sisa-sisa kayu atau *tobong* berbentuk segi delapan, dengan

tinggi bangunan 170 cm. Tebal tembok rata-rata 40 cm, sedang sisi-sisi tembok keliling segi delapan rata-rata memiliki panjang 120 cm. Komponen tembok terbuat dari batu bata dan pasangan campuran semen yang tidak begitu kuat, dengan diplester bagian luarnya. Saat ini, bangunan yang berfungsi sebagai tobong atau pembakaran ini tidak terpelihara, ditumbuhi pohon perdu, dan berhimpitan dengan pohon sukun.

Kolam Penampung Air atau Sarana Perendaman Kayu.

Bangunan kolam yang diduga berfungsi sebagai tempat merendam kayu ini memiliki ukuran lebar 6,64 m, panjang 9,63 m, dan tinggi tembok kolam 1,5 m. Sarana ini dibuat untuk proses pengawetan kayu. Konstruksi pagar kolam terbuat dari pasangan beton berplester dengan diberi pilar-pilar penguat. Pilar penguat dibuat setiap 2,4 meternya, yang mengelilingi struktur dinding-dindingnya. Dinding kolam diukur pada bagian luar memiliki ukuran tinggi 150 cm, sedangkan kedalaman kolam bagian dalam 2,06 meter.

Sumuran/Kolam Pendingin

Ada dua sumuran/kolam yang berada di sisi utara lokasi area struktur dudukan mesin. Sumuran air ini berbentuk bujur sangkar, dengan ukuran masing-masing sisi 1,8 m. Saat ini sumuran ditutup dengan papan dan kondisinya sudah dangkal. Diperkirakan berfungsi sebagai pemasok air untuk pendingin mesin. Sarana ini dibuat sekitar 25 cm di atas permukaan tanah, sedangkan kolam bagian bawah kedalamannya kurang lebih 1,5 m.

Dudukan Mesin

Struktur fondasi berbentuk empat persegi panjang dapat kita temukan di area *sawmill*. Hal yang mencolok yang menandai sarana mesin adalah ada bagian-bagian besi mur dan baut yang mengindikasikan adanya objek yang disatukan. Satu tempat dudukan mesin ada sekitar 16 sampai 20 mur. Di area ini ada empat dudukan mesin yang ditempatkan pada keempat sisinya.

Sisa bangunan bekas dudukan mesin ini juga terdapat parit-parit yang berguna untuk menghindari genangan air. Air yang menggenang, akan mengganggu mekanisme mesin atau dapat menimbulkan konsleting. Hingga saat ini masih ada sisa-sisa batang kayu yang sangat besar, yang dipercayai oleh masyarakat sebagai sisa kayu dari zaman Jepang. Oleh karena kondisi sarana dan prasarana area industri penggergajian kayu (*sawmill*) ini masih relatif bagus, pada tahun 1965 dinasionalisasi menjadi aset PT Inhutani .

Sisa *sawmill* di Tideng Pale berupa struktur lantai, bagian bangunan untuk mesin, kolam pendingin mesin dan kolam besar untuk merendam kayu (Gambar 1 dan 2). Ada pula tempat untuk pembakaran sisa kayu dan serbuknya. Unsur bangunan berupa lantai *sawmill* berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 39 m, dan lebar 16,70 m. Ada pula sisa lantai bangunan lain yang ukurannya lebih kecil terletak di samping lantai *sawmill* yang berukuran 12,15 x 7,30 m. Batas-batas sarana dan prasarana ini masih dapat dilihat dengan jelas, walaupun di sisi barat agak sulit dikenali karena fondasinya tertutup oleh semak-semak. Sementara itu, sebagian fondasi pada sisi timur sudah tertutup oleh fondasi rumah bangunan baru.

Luasan area penggergajian kayu ini secara keseluruhan diperkirakan meliputi puluhan hektar, termasuk hamparan hutan kayu yang ada di sekitarnya. Oleh masyarakat dipercayai bahwa untuk pertama kali sarana dan prasarana ini dibangun oleh perusahaan Jepang. Ukuran luas situs tidak kurang dari panjang 6 km dan lebar 2 km sebagaimana penjelasan dari narasumber. Aktivitas pokok *sawmill*, yaitu penggergajian atau pengolahan kayu, dan aktivitas tambahan, yaitu pembuatan perahu/kapal.

Salah satu ciri penting kawasan *sawmill* atau tempat penggergajian kayu ini adalah cara penataan area dan sistem penempatan yang begitu rapi dan sangat terencana. Pengerjaan sarana dan prasarana pendukung operasional mesin-mesin tampaknya telah memperhitungkan keselamatan kerja dan efisiensi.



Sumber: Dok. Balai Arkeologi Kalsel 2013
Gambar 1 Tempat Dudukan Mesin dan Parit



Sumber: Dok. Balai Arkeologi Kalsel 2013
Gambar 2 Kolam Penampung Air/untuk Perendaman Kayu

Situs Pertambangan di Gunung Pondok

Situs-situs berikut berhubungan dengan eksploitasi kekayaan mineral atau bahan tambang di sekitar Gunung Pondok, wilayah Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung. Adapun bukti peninggalan bekas aktivitas pertambangan adalah sebagai berikut.

Situs Gua Tambang 1

Letak gua yang diperkirakan berhubungan dengan aktivitas pertambangan, berada di pinggir sungai kecil, di Gunung Pondok. Gua ini terletak pada posisi astronomis UTM (N 50) pada 0526305 mT, 0370726 mU dengan tinggi dpl 60 m. Secara

administrasi, lokasi gua ini di Desa Buong Baru, Kecamatan Sesayap Hilir. Gua ini tampaknya sengaja dibuat, terlihat dari jejak pada dinding-dindingnya. Gua buatan ini menghadap ke arah timur laut, atau pada 60° . Ukuran tinggi mulut gua 1,7 m, dan lebar 80 cm bagian atas, dan 1,7 m bagian bawah. Gua ini memiliki ruang sempit dan dapat dimasuki. Ukuran kedalaman ruang gua kurang lebih 4 m dan ruang gua melengkung, sehingga menembus sisi tebing sungai yang sama pada sisi bagian hilirnya. Pintu mulut gua tembusan, ukurannya lebih kecil, dan terletak di bagian hilir sungai yang sama (Gambar 3 dan 4).

Batu penyusun di dalam ruang gua merupakan batuan kompak, sehingga diperlukan alat bantu yang kuat untuk menggali. Lantai gua



Sumber: Dok. Balai Arkeologi Kalsel 2013
Gambar 3 Mulut Gua Tambang 1, Letak di Tepi Sungai



Sumber: Dok. Balai Arkeologi Kalsel 2013
Gambar 4 Mulut Gua Lain yang Bersambungan dengan Mulut Gua Tambang 1

saat ini berair, karena aliran sungai saat pasang dapat masuk ke dalam ruang gua dengan mudah. Pintu mulut gua yang satu dengan mulut pintu yang lain hanya berjarak sekitar 4,5 m.

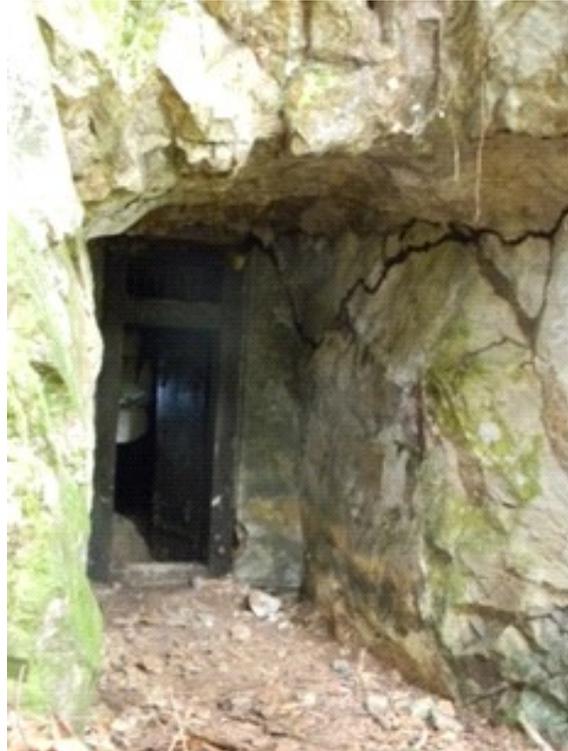
Jenis batuan penyusun gua merupakan jenis bahan tambang tertentu. Apakah di dalam gua ini ada uji coba untuk mencari bahan tambang, tidak ada informasi yang jelas. Demikian pula alasan bentuk gua yang demikian apakah ada hubungan dengan mencari alur galian emas, juga masih menjadi pertanyaan. Sisa batuan di sekeliling gua ini perlu dianalisis untuk diuji lebih jauh kandungan mineralnya. Dinding gua berwarna coklat kehitaman, ada bagian yang lebih terang berwarna keputih-putihan, dan banyak ditumbuhi lumut.

Situs Gua Tambang 2

Situs mirip gudang yang berbentuk gua terletak di Bukit Punduk atau Pondok. Posisinya tidak jauh dari area hutan produksi PT. Adindo Hutan Lestari. Secara administrasi, lokasi situs terletak di Desa Buong Baru, Kecamatan Sesayap Hilir. Posisi secara astronomis berada pada UTM (N 50) pada 0526896 mT, 0370814 mU pada elevasi 100 meter dibawah permukaan laut (dpl). Mulut gua memiliki arah hadap ke timur laut, atau sudut 60°.

Gua buatan ini berada pada bagian dasar tebing bukit yang menghadap ke utara (340°). Bukit ini tampak kokoh, dengan material penyusunnya berupa batu. Gua ini tampaknya sengaja dibuat menjadi ruang, dan difungsikan sebagai gudang (Gambar 5 dan 6). Pada bagian depan gua ada pintu bermulut dua, dengan ukuran lebar 2 m, tinggi 2,15 m, dan ada ruang gua yang diperlebar. Kusen pintu masih kokoh, dengan penampang tebal kayu kusen berukuran 18 x 20 cm. Lebar pintu 61 cm, tinggi pintu 151 cm, sedangkan bagian angin-angin berukuran 61 x 25 cm. Ukuran lebar gua 2,8 m, panjang 5 m, dan tinggi 2 m.

Pada bagian mulut gua buatan ini berserakan bata yang relatif utuh. Informasi tentang keberadaan gua ini didapatkan dari Tarakan Post pada Mei 2012, yang menyebutkan bahwa kondisi gua masih terkunci dari luar. Oleh karena tidak



Sumber: Dok. Balai Arkeologi Kalsel 2013

Gambar 5 Bagian Depan Gua Buatan dan Pintu



Sumber: Dok. Balai Arkeologi Kalsel 2013

Gambar 6 Di Dalam Ruang Gua Buatan yang Telah Dieksploitasi/Digali

adanya pengawasan, gembok yang berada di luar dirusak oleh orang tak dikenal. Besi-besi plat penguat pintu saat ini juga telah hilang. Vegetasi sekitar gua masih terpelihara keasliannya, dan ada kemungkinan akan terancam beberapa tahun ke depan. Di depan mulut gua terdapat pohon meranti, pohon bayur, pohon resak, dan lain-lain.

Situs Tambang di Desa Buong Baru

Situs yang diperkirakan berkaitan dengan aktivitas tambang ini secara administrasi terletak di Desa Buong Baru, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung. Posisi astronomis berada pada UTM (N 50) pada 0526459 mT, 0370610 mU pada elevasi 66 meter dpl. Tempat ini tampaknya dianggap keramat karena terdapat bendera warna-warni yang dipasang tidak jauh dari situs.

Lokasi situs terletak di tengah hutan, tidak jauh dari hutan produksi P.T. Adindo Hutan Lestari. Situs berada di tebing suatu bukit rendah yang di sekelilingnya akan tergenang air pada musim penghujan. Lokasi ini sangat rendah karena area ini sengaja digali untuk mencari benda berharga seperti besi dan mendapatkan sisa bahan tambang. Mulut gua sudah tertutup oleh genangan air. Sekarang besi pipa sisa sarana pencegah longsor sudah diambil masyarakat.

Dudukan instalasi atau bangunan empat persegi bahan terbuat dari bata, dan dapat dijumpai di atas kolam di dua tempat yang berdekatan. Fondasi dudukan dari bata ini terletak di bagian atas bekas tanah galian, sedangkan bangunan yang diperkirakan sebagai dudukan mesin di lokasi kedua berada lebih ke arah daratan. Bangunan bata membentuk huruf U panjang 7,35 m dan lebar 3,60 m, dan tinggi 65 cm. Ada mur-mur besi yang mengindikasikan bahwa bangunan struktur ini difungsikan sebagai dudukan mesin atau instalasi yang dapat dibongkar pasang (Gambar 7 dan 8).

Sisa Eksploitasi Minyak Bumi Pulau Bunyu

Situs terpenting dari Pulau Bunyu adalah bekas pertambangan minyak bumi yang telah dimulai pada masa penjajahan Belanda. Diperkirakan ekspedisi penemuan potensi minyak bumi, sezaman dengan masa eksplorasi minyak bumi di Tarakan. Menurut informasi masyarakat, potensi minyak sudah ditemukan sekitar tahun 1901 oleh BPM (Belanda), dan kemudian dilanjutkan oleh NIAM. Pertama kali sumur minyak yang berhasil dibor berjumlah 16,



Sumber: Dok. Balai Arkeologi Kalsel 2013

Gambar 7 Pintu Mulut Gua Eksplorasi yang Terendam Air



Sumber: Dok. Balai Arkeologi Kalsel 2013

Gambar 8 Tempat/Dudukan Instalasi Mesin Tambang

pada tahun 1922 hingga tahun 1937 dibor sumur minyak ke-17, dan baru pada tahun 1951 dikembangkan secara lebih produktif (Geo 2012: 43-44). Adapun sisa-sisa instalasi dan prasarana semasa awal eksploitasi yang masih dipertahankan antara lain rumah lengkung dan pipa-pipa penyalur minyak (Gambar 9 dan 10).

Pada saat ini eksploitasi minyak bumi di Pulau Bunyu masih berlangsung dan menghasilkan minyak bumi untuk menyumbang devisa negara. Demikian pula penambangan batu bara juga masih berlangsung di Pulau Bunyu.

Eksploitasi Alam di Pulau Nunukan

Secara geografis Pulau Nunukan berada sebelah timur laut pulau induk Kalimantan dan di



Sumber: Dok. Balai Arkeologi Kalsel 2012
Gambar 9 Rumah Pegawai BPM



Sumber: Dok. Balai Arkeologi Kalsel 2012
Gambar 10 Instalasi Pipa-pipa Minyak

antara pulau-pulau kecil seperti Sebatik, Tinabasan, dan Sebukat. Secara Administratif, Pulau Nunukan terdiri atas dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan. Dari hasil wawancara dan survei di lapangan, pada era kolonial daerah ini telah dieksploitasi kekayaan alamnya berupa kayu hutan.

Eksplorasi kayu

Saat ini hutan belantara telah berubah, ada yang beralih fungsi menjadi hutan produksi, ada yang menjadi permukiman, ada yang dibangun prasarana lainnya, seperti jalan dan perkebunan. Salah satu permukiman pantai di Nunukan yang masih meninggalkan jejaknya sebagai bekas hutan alam berada di daerah Tanjung Harapan (Gambar 11). Permukiman ini baru dirintis sekitar tahun 1970-an. Informasi ini diperoleh dari Bapak Taggu (110 tahun) yang menjadi saksi

perintisannya. Ia bersama tujuh orang temannya, mengalami awal mula pembentukan kampung. Pada tahun 1963, Bapak Taggu pertama kali datang ke Nunukan, setelah beberapa kota disinggahi, antara lain Tarakan, Bunyu, Enreng, dan Tawau. Menurutnya, area ini dahulu sangat lebat dengan pohon-pohon besar. Di sini masih banyak ditemukan ular dan binatang buas lainnya. Ia menuturkan bahwa dahulu dari Sungai Jepung hingga Tanjung Harapan ada rel kereta api yang dibuat oleh Belanda, yang kemudian diteruskan oleh Jepang. Kereta ini berfungsi untuk mengangkut kayu. Temuan yang masih tersisa berupa bantalan rel yang dibongkar penduduk dan dimanfaatkan sebagai tiang rumah. Adapun latar belakang penamaan Sungai Jepung dilatarbelakangi oleh peristiwa meninggalnya orang Jepang saat menebang atau mengangkut kayu di sungai tersebut.

Di Tanjung Harapan, penduduknya mayoritas adalah orang Makasar (Sulawesi) dengan mata



Sumber: Dok. Balai Arkeologi Kalsel 2012
Gambar 11 Sebagian Hutan yang masih Dipertahankan di Nunukan

pencaharian sebagai nelayan, pembuat perahu, dan petani rumput laut. Awal mula daerah ini disebut sebagai Desa Memolo yang berasal dari ungkapan bahasa Cina Banting “*nyak molo ma*”, yang artinya sarapan pagi. Latar belakang tempat sarapan inilah, lama-lama berubah susunan suku katanya menjadi “*mamolo*” yang sekarang disebut sebagai Tanjung Harapan. Desa ini berkembang lalu dibangun perkampungan baru, seperti Desa Mangkudu dan Desa Lancang. Belanda dan Jepang menduduki pulau ini dengan membangun beberapa fasilitas, seperti rel kereta (lori) pengangkut kayu yang mengelilingi Pulau Nunukan. Beberapa tangsi militer dari bahan kayu dibangun di atas bukit di Sedadap menghadap ke laut. Akan tetapi, saat ini semua tinggalan tersebut telah musnah karena besi-besi rel kereta pengangkut (lori) sudah diambil masyarakat, sedangkan bekas tangsi sudah runtuh berganti dengan rumah masyarakat.

Toponimi Sungai Bolong

Peninggalan toponimi jembatan, yang hingga kini masih melekat di ingatan orang-orang tua sekitar adalah jembatan Sungai Bolong. Jembatan ini terletak di Kampung Nunukan, Kecamatan Nunukan, berjarak sekitar 200 meter dari muara menuju laut. Jembatan ini diperlukan untuk mempermudah pengangkutan kayu dengan menggunakan transportasi sungai, transportasi darat, dan transportasi laut dipadukan, sehingga hasil pemindahan kayu-kayu dari hutan lebih optimal.

Lokasi jembatan Sungai Bolong saat ini merupakan permukiman padat penduduk. Menurut Bapak Ma'ruf Dewa, Pemangku Adat Tidung, jembatan Sungai Bolong ini dibangun pada masa pendudukan Jepang di Nunukan sekitar tahun 1942, tetapi Jepang kemudian pergi karena kalah perang. Pada awalnya jembatan Bolong dibangun di atas tiang-tiang kolom berbentuk bulat seperti drum, dengan diameter lebih besar, tetapi saat ini kolom jembatan tersebut sudah diganti menjadi kolom berbentuk lempengan dinding beton (Gambar 12). Adapun Sungai Bolong berkaitan dengan asal usul orang



Sumber: Dok. Balai Arkeologi Kalsel 2012

Gambar 12 Jembatan Bolong

Bone yang berkulit hitam (dalam bahasa Bone, *bolong*=hitam) karena jembatan berwarna hitam, dan yang sering lalu lalang di sungai tersebut adalah orang Bone, sehingga mereka memberi nama Sungai Bolong.

PEMBAHASAN

Pemerintah Hindia Belanda mengambil alih kekuasaan Inggris pada tahun 1816, dan harus memperbaharui hubungan dengan Kesultanan Banjar untuk melepas hak-hak politiknya atas Kalimantan Timur. Selanjutnya, JH. Tobias pada tahun 1823 datang ke Banjarmasin untuk merundingkan hal itu, dan melakukan pembaharuan kontrak perjanjian lama atas perjanjian sebelumnya di tahun 1817 (Ahyat 2013: 57-59). Melalui kontrak ini Kesultanan Banjar harus melepas pengaruhnya atas daerah Tanah Bumbu, Pagatan, Pasir, Kutai, Berau, Bulungan, dan Kotawaringin. Klausula ini termuat dalam *Jaarboek van het mijnwezen in Nederlandsh Indie*, Vol. 15, tahun 1886 (Ahyat 2012: 107-108). Sementara, Kesultanan Bulungan sempat memasuki kondisi politik yang kurang stabil, yang dipicu munculnya kubu-kubu politik. Keluarga istana terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu Sultan Muhammad Kaharuddin (sultan yang sebelumnya berkuasa) dan kubu Datu Alam, seorang tokoh penentang Belanda. Oleh karena itu, pada masa Sultan Kaharuddin inilah Belanda sempat mencoba menanamkan pengaruh awal kepada Kesultanan Bulungan. Hal ini ditandai dengan perjanjian

kontrak politik atau *Korte Verklaring* pada 12 November 1850 (Arianto 2003: 6-9).

Pertentangan antara klan Kayan-Berau yang berseberangan dengan klan Tidung-Sulu membuat kondisi politik internal Kesultanan Bulungan tidak stabil. Kondisi eksternal juga memperkeruh situasi, antara lain perdagangan monopoli oleh Inggris yang bercokol di Sabah dan Serawak, serta Spanyol di kepulauan Philipina. Belanda telah berhasil melumpuhkan kedaulatan Kesultanan Kutai dan Berau di selatan.

Oleh karena itu, Sultan Kaharuddin II dengan berat hati akhirnya menandatangani perjanjian kerjasama (*Konteverklaring de Tweede II*) pada Juni 1878. Pokok perjanjiannya, yaitu Belanda dapat menentukan kebijakan Sultan Bulungan termasuk urusan pajak, dan Sultan Kaharuddin terjamin keamanan dan kekuasaannya. Dalam catatan pemerintahan Belanda, pada tanggal 2 Februari 1877 diterbitkan *Ordonantie* berupa *Staatsblad* (surat keputusan) nomor 31 tentang kekuasaan mengatur Kerajaan Bulungan yang membawahi Tanah Tidung, Pulau Tarakan, Nunukan, Pulau Sebatik, dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Penegakan administrasi kolonial membuat pelayaran di sepanjang pantai Kalimantan Timur makin kondusif. Hasil bumi pedalaman Kalimantan Timur mulai dikenal oleh pemodal kolonial, termasuk hasil hutan. Bulungan menerima andil yang besar dalam perdagangan hasil bumi yang semakin marak pada akhir tahun 1860-an. Pada bulan Februari tahun 1867, untuk pertama kali getah *perca* dari hutan pedalaman Bulungan mencapai 150 pikul. Komoditas ini dibawa ke pelabuhan Samarinda, dan selanjutnya menjadi tanda keterlibatan perdagangan internasional, yang melibatkan kapal-kapal kolonial. Perdagangan dengan Bulungan dengan mengeksploitasi alam, oleh pasar internasional dirintis melalui investasi modal asing, dan menjadi suatu kenyataan baru. Dengan konstelasi ekonomi demikian, paling tidak ada agen-agen kekuatan yang mendominasi dalam aspek sosial, ekonomi dan politik, yaitu Kesultanan Bulungan, masyarakat pribumi, penguasa kolonial Belanda, pemegang modal swasta non pemerintah, dan

investor para imigran lokal atau regional (Nurchayani dan Yuwono 2017: 20-21).

Surat Keputusan yang lebih mengikat dikukuhkan kembali pada 15 Maret 1884 oleh Sekretaris Kerajaan Belanda di Bogor. Kerja sama itu ternyata menjadi pemicu serangkaian kebijakan Belanda yang merugikan Kesultanan Bulungan. Pada 1 Maret 1897 diterbitkan *Staatsblad* nomor 83 yang ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda A. D. H. Heringa. Isinya mengatur penyerahan tanah beberapa kerajaan di Kalimantan kepada Belanda. Kondisi ini membuat posisi tawar politik Kesultanan Bulungan menjadi sangat sulit, sehingga sultan sulit mengambil sikap untuk menolak seperti *Konteverklaring de Tweede II* yang pernah dilakukan oleh kakeknya, Sultan Khalifatul Alam Muhammad Adil, yaitu ketika situasi tidak menentu dan tidak berimbanginya kekuatan militer Bulungan terhadap Belanda, serta mulai menancapkan pengaruhnya di Bulungan.

Kekayaan alam Nusantara yang kaya, baik yang tumbuh maupun mineral yang terkandung di dalamnya telah menjadi perhatian bagi pemerintah kolonial Belanda, sehingga perlu payung hukum yang mengaturnya. Pada tahun 1899, terbit produk hukum bernama *Mijn Wet* 1899 (IMW). Pada pasal 5a disebutkan bahwa Pemerintah Hindia Belanda berwenang untuk melakukan penyelidikan dan eksploitasi, eksploitasi itu dapat dilakukan sendiri atau oleh perorangan, dan atau perusahaan berdasarkan perjanjian (Nalle dan Immanuel 2012: 477). Lebih jauh diterangkan IMW di *amendemen* tahun 1904 dan 1918 dengan mendasarkan pada hasil *amandemen* tersebut diatur bahwa pemerintah Hindia Belanda juga dapat memberikan konsesi kepada pihak swasta dalam melakukan eksploitasi pertambangan. Jangka waktu lamanya konsesi yang dapat diberikan cukup lama, yaitu 75 tahun (Nalle dan Immanuel 2012: 477).

Pada awal eksploitasi minyak bumi di Kalimantan Timur dan sekitarnya, semua perhatian terpusat pada Tarakan, namun semenjak tahun 1904 serikat perusahaan dibentuk untuk mengeksploitasi sumber alam lain, seperti rotan,

dan yang terpenting adalah sumber kayu. Di Bulungan ketika sultan yang memerintah adalah Sultan Kasimuddin, eksploitasi alam ini menjangkau wilayah Sebatik dan juga Pulau Mandul (Lindblad 2012: 53). Di Kalimantan bagian utara, wilayah Bulungan dan Nunukan untuk pertama kali investor asing selain Belanda, khususnya Eropa diberi kesempatan. Semenjak itu, perusahaan swasta asing mendapat hak-hak dan konsesi untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi alam, perusahaan-perusahaan itu antara lain; Bulungan *Getah en Ratan Maatschappij*, *Oost Borneo Cultuur*, dan *Handel en Mijnbouw Maatschappij* yang juga dikontrol oleh Inggris.

Seorang insinyur geologi bernama Jacobus Hubertus Menten (1832-1920) adalah tokoh yang paling berjasa mengungkap kekayaan alam Kalimantan. Sebelum ia berhasil menemukan minyak bumi di Balikpapan dengan sukses, dan merintis tambang batu bara di berbagai tempat di Kalimantan. Ia bersahabat baik dengan Sultan Kutai. Pada tahun 1899 selain merintis tambang minyak bumi, ia bekerja untuk konsesi tambang Chatlotte yang berpusat di Gunung Tabur Berau dan merintis tambang timah di Gunung Pondok di Bulungan. Saat ini tempat yang dimaksud menjadi wilayah Kabupaten Tana Tidung. Rupanya rintisan tambang timah tidak sukses (Lindblad 2012: 32).

Tideng Pale merupakan salah satu desa di Kecamatan Sesayap, yang yang paling ramai dibandingkan desa lainnya, seperti Desa Bebakung, Desa Gunawan, Desa Kujau, Desa Limbu Sedulum, Desa Mandupe, Desa Sebang, Desa Sebidai, Desa Seputuk, dan Desa Tideng Pale Timur. Menurut penuturan narasumber, bernama Mansyur (usia 73 tahun), dahulu sebagian besar penduduk Tideng Pale merupakan masyarakat pendatang, umumnya berasal dari Kampung Jelutung (Manjelijung), desa lama yang berada di tepi Sungai Sesayap bagian hilir. Mansyur mengisahkan bahwa perintisan pembangunan industri kayu di Tideng Pale telah berlangsung sekitar tahun awal 1944-an. Adapun alasan eksodus ini masih menurut

Mansyur, karena daerah Menjelijung diserang oleh Belanda. Dan di sisi lain masyarakat tidak mengetahui tentang sejarah dan peninggalan di desa tersebut.

Pengolahan kayu tersebut milik perusahaan Jepang yang mulai beroperasi sekitar tahun 1941, sebelum serangan tentara Jepang ke Kalimantan, hingga beberapa tahun sesudahnya. Adapun tujuan pengolahan kayu untuk membuat kapal kayu, sehingga kebutuhan armada perahu terpenuhi (Mansyur, 73 tahun). Pada saat itu Mansyur berumur 6 tahun, dan melihat bendera matahari terbit berkibar di sana.

Informasi lain menyebutkan bahwa situs ini termasuk baru, yang dibangun pada tahun 60-an oleh INHUTANI. Akan tetapi, kronologi yang terakhir ini kurang dapat diterima mengingat masih ada saksi hidup, yaitu Mansyur yang orang tuanya bekerja di *sawmill* ini hingga tahun 1944. Dengan demikian, keterangan dari Mansyur ini lebih dapat dipercaya. Ia juga membuat gambaran tata ruang *sawmill*, termasuk bendera yang dikibarkan pada saat itu, yaitu Hinomaru bendera kebangsaan Jepang (Susanto 2013a: 9-11)

Salah satu motivasi utama pemerintahan kolonial Belanda terhadap dominasi Kalimantan Timur adalah kekhawatiran atas upaya ekspansi Inggris melalui James Brook yang telah berhasil menancapkan hegemoni politiknya di Serawak tahun 1840-an. Sebagai usaha perimbangan kekuatan pengaruhnya, pemerintah kolonial Belanda membuat kontrak tanggal 12 November 1850, sebagai bentuk pengakuan kekuasaan dan pengaruh di sana atas Bulungan, dan penegasan batas-batas Bulungan dengan wilayah perbatasan Gunung Tabur, dengan koloni Sulu di Laut Tanjung bernama Batu Tinagat serta Sungai Tawau. Puncak keberhasilan Inggris, diperoleh saat keberhasilan membujuk Kesultanan Brunai dan Sultan Sulu untuk membuat kontrak pada tanggal 22 Januari 1878. Kontrak ini dimaksudkan mendorong kedua kesultanan Melayu ini untuk menyerahkan wilayah mereka di sepanjang timur Kalimantan Utara hingga Pulau Sibeku, termasuk aliran sungai di selatan Kota Tawau yang langsung berbatasan dengan pengaruh Belanda, demikian

keterangan dari Pieter A. van der Lith. Kontrak tanggal 2 Juni 1878 yang dibuat Belanda termotivasi oleh ketakutan atas ekspansi Inggris ke selatan. Belanda pun mendapatkan hak lebih luas dalam kehidupan politik dan ekonomi perdagangan di Bulungan. Di sisi lain Sultan Bulungan mendapat jaminan pengakuan, oleh Batavia atas legitimasi kekuasaan dan perlindungan terhadap ancaman kekuatan asing, perompak, termasuk kekuatan politik masyarakat Bugis. Karena orang-orang Bugis menguasai perekonomian, sektor perdagangan dan pelayaran. Kelompok lain, yang juga merupakan ancaman adalah para perompak laut Balignini asal Kesultanan Sulu, yang menguasai perdagangan budak dan amunisi (Nurcahyani dan Yuwono 2017: 25-26). Kelompok ini juga menjadi permasalahan yang tidak ringan, yang mengganggu Belanda dan Spanyol di Filipina Selatan.

Pejabat Belanda di Batavia memikirkan bagaimana meningkatkan hegemoni dan pengaruh yang lebih kuat atas wilayah Bulungan. Pada tahun 1891, pemerintah kolonial atas kepentingan modal bagi eksploitasi alam menjadi syarat mutlak. Situasi menguntungkan di pihak Belanda, bahwa sikap Bulungan dan para bangsawannya bersikap kooperatif, tidak menimbulkan kecemasan, kecuali masalah perbudakan dan perompakan. Solusi diplomatik antara London dan Den Haag mengenai batas-batas kekuasaan mereka di Kalimantan Utara telah dirundingkan, dan baru pada 20 Juni 1891 kedua belah pihak menandatangani perjanjian perbatasan koloni masing-masing dengan garis batas wilayah 4° 10" Lintang Utara dan 117° Bujur Timur. Pulau Sebatik terpotong, ketika garis ini diteruskan di daratan, Sungai Semenggaris terletak di wilayah Belanda, namun dipotong 4°20' Lintang Utara dan 117° Bujur Timur, batas ini berbelok ke barat menuju rangkaian pegunungan utama yang memisahkan sungai-sungai yang mengalir ke Sabah dan Serawak. Kontrak politik antara Belanda-Bulungan dibuat pada tanggal 14 Desember 1889, yang disahkan oleh Parlemen Belanda (Nurcahyani dan Yuwono 2017: 33-34). Pembuatan kontrak ini memiliki kaitan langsung

dengan rencana penerapan perjanjian 20 Juni 1891 (*Traktat van London*) antara Inggris dan Belanda atas wilayah beberapa sultan di sana, terutama saat ada laporan Sultan Sulu memberitahu pejabat Inggris bahwa sebenarnya ada sebagian tanahnya dilewati garis batas. Legalitas batas-batas wilayah menjamin hegemoni kolonial Belanda, sekaligus mencegah terjadinya konflik dengan Inggris atau raja-raja pribumi (Nurcahyani dan Yuwono 2017: 35).

Kesepakatan politik Inggris-Belanda, dan kontrak dengan sultan Bulungan untuk menjamin intervensi kolonial dan juga kepentingan modal swasta. Seorang pengusaha J. Lingard di bulan Agustus 1891 meminta izin Pemerintah Hindia Belanda di Batavia, untuk membuat kesepakatan monopoli eksploitasi pencarian kerang dan mutiara di wilayah Bulungan (Nurcahyani dan Yuwono 2017: 36).

Untuk mengamankan kepentingannya, di bulan Juni 1893 terjadi perubahan struktur pemerintahan kolonial, seorang kontrolir klas 1 J.G.W. Lux diberi kewenangan atas dua kesultanan, yaitu Berau dan Bulungan. Tahun 1893 pengadaan rumah dinas dikeluarkan (Nurcahyani dan Yuwono 2017: 38). Pada bulan Juni 1894, J.H. Menten meminta izin ke gubernur jenderal di Batavia untuk konsesi bagi eksplorasi pertambangan di daerah Bulungan. Pada akhir 1894 izin dikeluarkan setelah diduga daerah Bulungan memiliki potensi kandungan mineral yang kaya seperti termuat dalam *Verspelde Indisce Berichten* dalam *De Lokomotief*, tanggal 22 Juni 1894 lembar ke-2. Potensi minyak bumi dan batu bara rupanya menarik investor seperti G.F.J Fabius di bulan Februari untuk meminta izin Sultan Muhammad Aliudin melakukan eksploitasi batu bara, tetapi dalam pelaksanaannya Fabius mengalami kesulitan karena kekurangan tenaga kerja kasar. Perpanjangan kontrak pada tahun berikutnya di tahun 1897 ditolak. Konsorsium perusahaan yang memiliki modal lebih kuat dibentuk dengan nama perusahaan pertambangan Boekit Pondok, di bulan Maret 1899 dengan modal f 1 juta untuk melakukan eksploitasi pertambangan di Kalimantan Timur,

termasuk wilayah Kutai dan Bulungan. Produk yang dieksploitasi tidak terbatas pada minyak bumi dan batu bara melainkan juga bijih besi, dan dijual kepada konsumen Jerman (Nurcahyani dan Yuwono 2017: 41- 42). Di Bukit Pondok ini ditemukan peninggalan lubang dan gua sebagaimana dikabarkan dalam *De Locomotif* tanggal 24 Maret 1899 lembar 2 menyebutkan di bukit inilah eksploitasi pernah berlangsung.

Jepang menjadi kekuatan ekonomi dunia setelah muncul Restorasi Meiji. Hubungan perdagangan Jepang tidak lepas dari perjanjian antara Jepang – Hindia Belanda pada tahun 1912 yang menjamin “terbuka pintu Hindia Belanda bagi Jepang seluas-luasnya. Penanaman modal Jepang di Nusantara sebelum tahun 1930 kebanyakan dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan swasta Jepang, namun sejak tahun itu pula beberapa perusahaan semi-pemerintah beroperasi dengan bidang usaha penebangan kayu, pertambangan, dan menangkap ikan. Perusahaan seperti Nanyo Kohatsu yang dipengaruhi pihak militer dan angkatan laut Jepang (Onghokam 2002: 31).

Sektor pertambangan di Bulungan menjadi primadona pemodal barat dan yang utama dipimpin oleh Ir. J.H. Menten dengan nama perusahaan bernama NV. Boekit Pondok yang mendapat konsesi selama 75 tahun dan ternyata tempat tersebut mengandung emas, perak, timah, tembaga, seng, dan antimonium. Konsesi ini luasnya 4221 bahu, bagian dari wilayah Kesultanan Bulungan dan Belanda berhak atas 10% produksinya, sementara sultan akan menerima ganti rugi dari lahannya lewat pemerintah kolonial (Nurcahyani dan Yuwono 2017: 55). Pada tahun 1903 NV. Boekit Pondok diambil alih oleh *Koninklijk Nederlandsche Maatschappij*, sejak tahun 1905 kegiatan eksploitasi dikhususkan pada minyak bumi di Tarakan (Nurcahyani dan Yuwono 2017: 56). Pada tahun itu pula F.W. Fabius, investor yg sebelumnya pernah mendapatkan izin konsesi eksplorasi pertambangan mengajukan kembali permohonan hak untuk konsesi mengeksploitasi hutan Bulungan dengan perusahaannya bernama

Maatschappij voor Handel, Landbouw en Nijverheid Boeloengan dibentuk pada bulan Februari dengan modal f 2.500.000 terbagi dalam 250 lembar saham (Nurcahyani dan Yuwono 2017: 57).

Investasi Jepang sudah mulai masuk tahun 1930 di Kesultanan Bulungan, khususnya dalam bidang hasil hutan. Tak tanggung-tanggung ada delapan tempat yang merupakan daerah konsesi hutan, khususnya di Sesayap, yang dahulu bagian dari Bulungan. Daerah eksploitasi tidak jauh dari aliran Sungai Sesayap (Nurcahyani dan Yuwono 2017: 144-145). Baru sekitar tahun 1936, investor dari Jepang tertarik di sektor perminyakan dan penebangan kayu (Nurcahyani dan Yuwono 2017: 151). Pada tahun 1933 telah dilaporkan dalam *Hout aankap op Borneo* bagian *Het nieuw van dendag voor Nederlandsh Indie* pada tanggal 20 Juli pada lembar ke-2 bahwa ada empat lokasi yang diminati oleh Jepang, yaitu Sesayap, Malinau, Sembakung, dan Tanah Merah. Pada tahun 1936, investor datang dengan perusahaan bernama Nanyo Ringo Kaisha yang semula di Sesayap dan berpindah ke Sangkulirang. Pada tahun 1938 investor Jepang tertarik menanamkan modalnya dan bekerjasama untuk mengeksploitasi kayu meranti di Nunukan (Nurcahyani dan Yuwono 2017: 151). Selanjutnya, sekitar tahun 1939 perusahaan Jepang atau firma-firma mulai berinvestasi di bidang perikanan dan mengontrol nelayan–nelayan di Kalimantan bagian Timur (Nurcahyani dan Yuwono 2017: 156).

Pada tahun 1935 Belanda mengunjungi Pulau Bunyu untuk melihat sumber kekayaan alam minyak bumi di wilayah ini dan berupaya mengeksploitasinya melalui perusahaan NIAM dan BPM walaupun masih menderita kerugian. Pada tahun 1937, reorganisasi wilayah Kesultanan Bulungan dilakukan dengan menggabungkan hegemoni politik Tidung, yang wilayah kekuasaannya di Daerah Aliran Sungai Sesayap dan Sembakung ke dalam *Ordeafdeling* Bulungan (Nurcahyani dan Yuwono 2017: 158)

Kepentingan perdagangan Jepang terhadap Hindia Belanda ditandai dengan intensifnya kegiatan perundingan dan komunikasi ekonomi. Sebelum Perang Dunia II meletus, hubungan

perdagangan dan politik Hindia Belanda–Jepang sangat baik. Keadaan pun berbalik arah saat meletus perang Dunia II yang menimbulkan permasalahan baru terhadap hubungan Jepang–Hindia Belanda pada tahun 1940-1941, terutama dalam perdagangan dan hubungan diplomatik. Sebelum tahun 1940, pihak Belanda selalu menekankan tentang peningkatan ekspor dari Indonesia ke Jepang untuk mengimbangi impor dari Jepang. Sebaliknya, pihak Jepang khawatir dari pihak Belanda akan menghentikan ekspor dan justru Jepang ingin membeli bahan mentah dan barang strategis dari Hindia Belanda (Ongkhoham 2002: 35). Saat Perang Dunia II masih berlangsung di Eropa, hubungan Hindia Belanda dan Jepang mengalami posisi sulit. Jepang adalah sekutu Jerman, yang berpotensi menjadi musuh bagi Belanda, sementara Jepang adalah mitra dagang Belanda yang juga berinvestasi di daerah perbatasan dengan penanaman modal di sektor hutan berupa eksploitasi kayu dan minyak bumi. Pasokan minyak bumi dari Kalimantan semakin berarti akibat embargo Amerika dan koloni-koloninya atas komoditas minyak bumi. Belanda melihat penanaman modal ke Kalimantan khususnya dan Indonesia pada umumnya, serta beroperasinya perusahaan yang telah dicurigai bahwa mereka bukan semata-mata memiliki motif ekonomi, tetapi telah menyelundupkan mata-mata untuk menguasai koloni Hindia Belanda yang kaya sumber daya alam, khususnya minyak bumi (Nurchayani dan Yuwono 2017: 167).

Kekhawatiran Belanda terbukti benar, invasi Jepang ke Tarakan terjadi pada tanggal 11 Januari 1942, dengan menerobos Pantai Amal, pantai sisi selatan Tarakan yang paling lemah pertahanannya. Jaringan mata-mata atau *spionase* ternyata sudah disebar jauh sebelum invasi. Aktivitas *spionase* dilancarkan dengan penyamaran sebagai nelayan, buruh, pembuka lahan, hingga menjadi pengusaha. Hal yang paling buruk bagi sistem pertahanan adalah tanpa disadari pengusaha atau kontraktor Jepang pun turut terlibat dalam pembangunan kubu pertahanan di berbagai daerah di Tarakan. Kitamura, seorang berkebangsaan Jepang

berhasil menyamar sebagai pengusaha Cina (Santosa 2005: 22-23).

Kekayaan alam nusantara, khususnya Kalimantan bagian utara ini telah menunjukkan potensi yang beragam. Kegiatan eksploitasi telah lama dikelola dan diusahakan oleh bangsa asing dengan didukung penguasa lokal saat itu. Wilayah ini sekarang telah menjadi yurisprudensi NKRI, sudah selayaknya dikelola dan ditata lebih baik daripada era sebelumnya. Sebagaimana tergambar dari data arkeologi yang disebut sebelumnya bahwa orang asing sangat berminat untuk mengeruknya. Sudah saatnya pengelolaan alam yang mencakup eksploitasi dan pemanfaatannya dilakukan dengan memegang teguh prinsip-prinsip yang lebih baik, yaitu kesadaran akan azas perikehidupan dalam keseimbangan, sehingga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dapat berkesinambungan dan maksimal.

PENUTUP

Eksploitasi kekayaan alam di utara Kalimantan tidak hanya melibatkan Belanda sebagai aktor implementasi politik imperialis, tetapi saat ekonomi liberal berlangsung mereka juga melibatkan pengusaha-pengusaha atau investor asing lainnya, yaitu Inggris dan Jepang. Pengusaha atau pemodal pribumi pun ikut berperan melalui penanaman modal, walau tidak menonjol. Kekayaan alam yang belum tergarap di wilayah ini menggoda para pemodal untuk berspekulasi mempertaruhkan modal usahanya untuk mengeksploitasi kekayaan alam, baik di sektor kehutanan dengan komoditas berbagai jenis kayu, maupun bahan tambang. Belanda sudah menancapkan pengaruhnya jauh sebelum era 1900-an, sedangkan sejak tahun 1930-an disebut era penanaman modal. Mereka bekerjasama dengan Kesultanan Bulungan sebagai pemilik kekuasaan tradisional, Belanda yang mengatur regulasi, dan pemodal asing memberi dukungan lainnya.

Penanaman modal tidak terbatas tidak hanya dari Belanda dan Inggris, tetapi Jepang juga tertarik untuk mempertaruhkan modalnya. Jepang

mengerahkan pemodal dan pengusahanya untuk berusaha di Kalimantan bagian utara ini. Era Perang Dunia II, sebagaimana kekhawatiran Belanda terbukti bahwa Jepang seperti bermain di air keruh. Terutama mencari komoditas yang diperlukan oleh negaranya, akibat embargo Amerika terhadap Jepang. Jepang juga menempatkan *spionase* persiapan invasi ke Hindia Belanda untuk menguasai kekayaan alam terutama minyak bumi. Invasi Jepang ke Kalimantan yang

kaya sumber alam, seakan tak menemui rintangan yang berarti. Kekayaan alam Kalimantan telah menumbuhkan kecemburuan dan mendatangkan keirian bangsa lain. Kewaspadaan nasional di era ekonomi liberal harus tetap dikembangkan, sehingga posisi tawar kepentingan ekonomi nasional tetap diutamakan. Kekayaan alam perlu dikelola dengan memperhatikan azas perikehidupan dalam keseimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyat, Ita Syamtasyiah. 2012. *Kesultanan Banjarmasin Pada Abad Ke-19: Ekspansi Pemerintah Hindia Belanda*. Tangerang: Serat Alam Media.
- _____. 2013. *Kesultanan Kutai 1825-1910: Perubahan Politik dan Ekonomi Akibat Penetrasi Kekuasaan Belanda*. Tangerang: Serat Alam Media.
- Arianto, Sugeng. 2003. "Kerajaan Bulungan 1555 – 1959." *Skripsi*. Malang: Universitas Negeri Malang, Fak.Sastra Program studi Sejarah
- Erman, Erwiza. 2005. *Membaranya Batubara Konflik Kelas dan Etnik Ombilin Sawah Lunto, Sumatera Barat (1892-1996)*. Desantara: Pondok Labu Jakarta Selatan.
- De Groot, C. 1868 "Over de Borneo-steenkolen en Here Geschikheid als Brandstof." Hlm 69-149 dalam *Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlansch Indie*. Amsterdam: C.F. Stemler.
- Geo, Khaeruddin Elang. 2012. *Pulau Bunyu, Kemarin, Hari ini dan Esok*. Yogyakarta: Digna Pustaka.
- Lindblad, J. Thomas. 2012 . *Antara Dayak dan Belanda*. Malang: Lilin Persada Press.
- Nurchayani, Listiyana dan Harto Yuwono. 2017. *Politik dan Ekonomi Perdagangan Bulungan, pada Abad XIX – XX (1878-1942)*. Yogyakarta: Kepel.
- Onghokham. 2002. *Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta: Gramedia.
- Oktrivia, Ulce dan Nugroho Nur Susanto 2016. "Rekontruksi dan Fungsi Struktur Sumur Putaran Pada Tambang Batu Bara Oranje Nassau, Pengaron." *Naditira Widya* 10 (2): 129-144.
- Posewitz, Theodor. 1892. *Borneo: Its Geology and Mineral Resources*. London: Edward Stanford.
- Santosa, Iwan. 2005. *Tarakan Pearl Harbor Indonesia (1942-1945)*. Jakarta: Primamedia Pustaka.
- Susanto, Nugroho Nur. 2013a "Eksplorasi Peninggalan Arkeologi di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara." *Laporan Penelitian Arkeologi*. Banjarbaru: Balai Arkeologi Kalimantan Selatan.
- _____. 2013b. "Pengaruh Islam Terhadap Identitas Tidung Menurut Bukti Arkeologi." *Naditira Widya* 7 (2): 117-129.
- Utomo, Bambang Budi, Endjat Djaederajat dan Magdalia Alfian (Penyunting). 2012. *Atlas Sejarah Indonesia Masa Kolonial*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya.
- Nalle, Williamson dan Victor Immanuel. 2012. "Hak Menguasai Negara Atas Mineral Batubara Pasca Berlakunya Undang-

undang Minerba.” *Jurnal Konstitusi* 9 (3):
473-495.
Zain, Zelda, Yulia Nofiana, M. Nizar Aristya, Risna
Ayu Fadilah, Husnul Khotimah. 2015.

Makalah “Sejarah Minyak Bumi”. Jakarta:
UIN Syarif Hidayattullah. Sumber:[http://
www.academia.edu/15882380/
makalah_SEJARAH_MINYAK BUMI](http://www.academia.edu/15882380/makalah_SEJARAH_MINYAK BUMI).